

Judul : Stop Saling Hujat Di Media Sosial
Tanggal : Senin, 16 Januari 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Stop Saling Hujat Di Media Sosial



Roem Kono

KETUA Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono meminta semua ormas dan partai politik tidak menyudutkan pemerintahan Jokowi. Ormas MKGR menilai kepemimpinan Jokowi sudah berupaya keras membangun negara.

"Presiden Jokowi sudah bekerja keras, tapi ada kelompok yang berupaya merusak. Saya ingatkan agar kelompok kepentingan itu tidak lagi mengganggu pemerintahan Jokowi yang sudah on the right track," katanya di sela-sela acara HUT MKGR di Jakarta, kemarin.

Roem menilai, pemerintahan Jokowi saat ini sedang berupaya keras untuk membangkitkan perekonomian nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program kerja di lapangan.

"Namun upaya keras pemerintah Jokowi bisa terganggu kalau ada kelompok yang kerap muncul memaksakan kehendak dengan berbuat onar dan anarkis," katanya.

Dia menilai, begitu pentingnya saat ini seluruh elemen masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi. Agar

stabilitas negara tidak terganggu. Munculnya kelompok pengkritik pemerintah yang terlalu frontal akan memicu instabilitas politik yang pada akhirnya mengganggu program pemerintah dalam kesejahteraan rakyat.

"Ormas MKGR sebagai ormas yang mendirikan dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui Partai Golkar akan konsisten mendukung penuh berbagai terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi sampai 2019," tegasnya.

Ketua BURT DPR ini menyalurkan, saat ini banyak fitnah dan konten yang dibuat provokasi menjelek-jelekan pemerintahan Jokowi berkembang di media sosial. Oleh karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk menghindari saling hujat di media sosial.

"Tidak mendidik kalau kita lihat di media sosial pada belakangan ini isinya saling menghujat, isinya saling mengejek, isinya saling memaki, isinya banyak fitnah. Negara ini tidak akan maju kalau rakyat mudah percaya berita hoax tentang keburukan pemerintah," katanya.

Menurutnya, ke depan hujatan dan fitnah terhadap pemerintah harus dihilangkan karena tindakan-tindakan tidak terpuji itu bukan merupakan karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya.

Tindakan tersebut ditegaskannya bukan merupakan tata nilai bangsa Indonesia dan Umat Islam di Tanah Air.

"Kita itu punya ideologi Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah, musafakat dan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi kalau berbeda pendapat dengan pemerintah, jangan membuat fitnah," ujarnya. ■ QAR